

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Orientasi politik pada dasarnya merupakan cara pandang yang berhubungan erat dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat, orientasi politik suatu masyarakat dapat muncul dari dalam masyarakat itu sendiri atau dapat muncul dari luar masyarakat, tetapi tanggapan anggota masyarakat terhadap orientasi itu berbeda-beda tergantung dari pengetahuan dan nilai-nilai yang dimilikinya (Sjamsudin, 1993: 8).

Hal di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan Arif Sofianto (2013), bahwa figur politik berupa tokoh individu yang memiliki integritas terlihat semakin berpengaruh terhadap pilihan ketimbang partai politik, meskipun sebagian besar orang masih memilih partai, figur individu lebih penting dibanding partai politik. Pemilih lebih mengutamakan figur individu yang peduli pada rakyat serta visi-misi dan programnya dianggap sejalan serta bersikap anti korupsi. Partai politik dengan dukungan terbanyak adalah yang relatif tidak memiliki banyak persoalan atau terlibat berbagai masalah. Pemilih tidak terlalu memperhatikan figur individu yang karismatik dan berwibawa, sedangkan figur individu yang bijaksana lebih diharapkan. Pemilih tidak menyukai calon yang sering mengumbar janji karena terlalu

banyak janji dianggap semakin banyak mengingkari. Banyak mengumbar janji memberikan kesan negatif bagi calon di mata pemilih

Penelitian lain oleh Setiajid (2011) yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya adalah faktor pengaruh orang tua, faktor pilihan sendiri, faktor media massa, partai politik dan iklan politik, dan faktor teman sepergaulan. Faktor yang dominan yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada adalah faktor pengaruh dari pilihan sendiri dan orang tua. Orientasi politik pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya meliputi orientasi kognitif, afektif maupun evaluatif sudah mengarah pada tataran orientasi positif dimana orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik.

Winda Meilan (2009), dalam penelitiannya menyatakan bahwa orientasi politik pemilih perempuan adalah suatu produk yang tidak hadir dengan begitu saja, terdapat faktor-faktor pengetahuan, perasaan, dan penilaian yang mempengaruhi orientasi politik seorang pemilih perempuan. Berdasarkan tiga tipe orientasi politik yang diteliti terdapat orientasi afektif yang sangat berpengaruh dalam perilaku politik pemilih perempuan dalam memilih dikarenakan banyaknya pemilih perempuan yang mempunyai dasar pemikiran dihubungkan dengan perasaannya, seperti : memiliki rasa suka dan tidak suka karena melihat penampilan caleg tersebut, berpikiran bahwa perempuan tidak pantas untuk masuk ke dalam dunia politik, serta dalam memilih tidak rasional

Penelitian Hastato Pribady (2011) menunjukkan bahwa orientasi politik aktivis perempuan LSM Damar dan LSM Sekar Sewu pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2010 adalah sebagai berikut: (1) Orientasi kognitif, aktivis perempuan memiliki pemahaman terhadap hakikat Pemilihan Walikota Bandar Lampung sebagai suatu mekanisme demokratisasi untuk memilih pemerintah kota secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (2) Orientasi afektif, para aktivis perempuan cenderung memiliki perasaan dan sikap yang kurang baik apabila pada proses Pemilihan Walikota Bandar Lampung masih terdapat berbagai kecurangan dan kelemahan yang dapat mengurangi dan mengotori hakikat demokrasi lokal (3) Orientasi evaluatif, para aktivis perempuan menilai bahwa proses demokratisasi lokal yang diwujudkan dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung secara umum sudah berjalan dengan baik, namun mereka memiliki harapan kepada Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk memperhatikan kepentingan kaum perempuan.

Parlindungan Sihombing (2013) dalam artikelnya menyatakan bahwa survei terbaru terkait orientasi pemilih dalam pemilihan umum (pemilu) dilakukan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pertengahan tahun ini. Secara sederhana, survei ini antara lain ingin melihat sejauh mana masyarakat Indonesia saat ini dalam menentukan pilihan pada pemilu lebih dipengaruhi oleh partai politik atau oleh figur calon legislatif.

Fakta politik menunjukkan bahwa Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014 didominasi oleh para calon gubernur yang berlatar belakang birokrat atau pejabat negara yang masih aktif. Dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2014 terdapat empat pasangan calon gubernur sebagai berikut:

1. Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri

Muhammad Ridho Ficardo adalah Ketua DPD Partai Demokrat Lampung dan Bachtiar Basri adalah Bupati Tulangbawang Barat

2. Berlian Tihang dan Mukhlis Basri

Berlian Tihang adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Mukhlis Basri adalah Bupati Lampung Barat

3. Muhammad Alzier Dianis Thabrani dan Lukman Hakim

Muhammad Alzier Dianis Thabrani adalah Ketua DPD Partai Golkar Lampung dan Lukman Hakim adalah Walikota Metro

4. Herman HN dan Zainudin Hasan

Herman HN adalah Walikota Bandar Lampung dan Zainudin Hasan adalah berlatar belakang pengusaha

(Sumber: [www.radarlampung.calongubernurlampung2014.html](http://www.radarlampung.calongubernurlampung2014.html). Diakses 22 Februari 2014)

Sesuai dengan data di atas maka diketahui bahwa para elit politik yang saat ini sedang berkuasa atau belum habis masa kepemimpinannya sebagai kepala daerah di kabupaten/ kota tertentu, berusaha untuk melanggengkan kekuasaan mereka dengan cara mencalonkan diri sebagai calon Gubernur pada Pemilihan Gubernur Lampung. Hal ini menunjukkan adanya nuansa feodalisme dalam Pemilihan Gubernur Lampung.

Feodalisme merupakan struktur pendelegasian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan/monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diklaimnya melalui kerja sama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. (Miriam Budiardjo, 1998: 7-8).

Peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak melarang kepala daerah/wakil kepala daerah yang masih aktif untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur, tetapi ditinjau dari etika politik, hal ini kurang baik, sebab idealnya kepala daerah/wakil kepala daerah yang masih aktif tersebut menyelesaikan masa jabatannya di kabupaten/kota masing-masing dan melaksanakan dan menyelesaikan program yang telah mereka janjikan kepada masyarakat pada saat berkampanye untuk menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah kabupaten/kota tersebut sampai masa jabatannya berakhir.

Para kepala daerah/kabupaten kota tersebut umum berdalih bahwa dengan mencalonkan diri sebagai gubernur/wakil gubernur Lampung mereka berkesempatan untuk mengabdikan diri secara lebih luas kepada masyarakat Lampung, tetapi yang nampak justru adanya ambisi untuk menjadi penguasa. Hal ini merupakan perwujudan dari budaya politik aristokrasi, yaitu kepemimpinan atau pemerintahan yang dijalankan oleh sekelompok orang atau elit politik tertentu, yang dianggap sebagai yang terbaik untuk menjalankan pemerintahan. Para elit politik tersebut saling berkoalisi dalam menggalang kekuatan menghadapi pemilihan Gubernur Lampung.

Sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, setiap calon kepala daerah, partai politik dan tim suksesnya berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan sosialisasi mengenai diri dan program yang mereka tawarkan. Melalui proses sosialisasi ini, masyarakat calon pemilih memiliki kesempatan maksimal untuk mendapatkan informasi kepala daerah, sebagai dasar bagi mereka dalam menentukan pilihan. Hal ini sesuai dengan konsep bahwa masyarakat merupakan sasaran sosialisasi yang dilakukan oleh para calon kepala daerah dan partai politik, yang menjanjikan berbagai program dan perubahan bagi masyarakat, seperti sembako murah, pendidikan murah, pengobatan murah dan sebagainya.

Salah satu calon dalam Pilkada Provinsi Lampung adalah Herman H.N., yang menjabat sebagai Walikota Bandar Lampung. Herman H.N. telah melakukan sosialisasi politik dengan menyebarkan berbagai media berupa spanduk, pamflet dan media lainnya ke berbagai daerah di Provinsi Lampung. Pencalonan Herman HN tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi politik yang dilaksanakan tersebut merupakan proses distribusi informasi politik. Sosialisasi politik membantu sebagai media distribusi dan penyebaran sejumlah hal ke masyarakat luas (Hal ini sangat bertolak belakang dengan keadaan yang berlaku dalam sistem politik tertutup, di mana distribusi dan penyebaran informasi serta pengetahuan politiknya terbatas pada kelompok).

Sosialisasi politik sekaligus merupakan media partisipasi. Hal pertama yang disebarkan dalam sosialisasi politik ke masyarakat adalah informasi dan pengetahuan tentang politik. Aktivitas sosialisasi politik membuat masyarakat

tidak buta informasi. Mereka tidak lagi memilih asal memilih, melainkan lebih mempertimbangkan banyak hal ketika memutuskan akan memilih kandidat calon kepala daerah.

Herman HN yang masih menjabat sebagai Walikota Bandar Lampung mengandalkan beberapa program unggulan pada berbagai bidang sebagai materi sosialisasi politiknya menjelang Pemilihan Gubernur Lampung. Hal ini mengacu pada pelaksanaan program selama menjabat sebagai Walikota Bandar Lampung, misalnya pada bidang kesehatan adanya program berobat gratis di 12 Rumah Sakit Swasta, dan 4 Rumah Sakit Pemerintah, semua penyakit di ruang kelas tiga selama 5 (lima) hari untuk masyarakat yang tidak mampu dengan jumlah anggaran 30 milyar / tahun. dan selama 2 tahun ini sudah dibangun 15 Puskesmas rawat inap 2 lantai.

Program di bidang pendidikan adalah peningkatan kualitas tenaga kependidikan dari jenjang S1 dan S2 sejumlah 120 guru sebesar Rp. 20 Juta/ guru/ tahun. Pembagian perlengkapan sekolah (2 stel pakaian, sepatu, kaos kaki, topi, tas dan alat-alat tulis) untuk 40.000 siswa secara gratis setiap tahun, bantuan biaya operasional 318 PAUD sebesar 5 juta/PAUD. Pemberian kuota 40% anak tidak mampu diterima di sekolah SMP, SMA Negeri dan SMK di seluruh Bandar Lampung secara gratis tanpa tes. Pemberian insentif guru honorer murni TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK berjumlah 6.000 guru sebesar Rp. 900.000/guru dengan nilai total Rp. 5,4 Milyar.

Program di bidang keagamaan adalah pemberian operasional untuk 3.700 guru ngaji sebesar 500.000/orang/tahun, bantuan uang tunai 1 juta rupiah/tahun

setiap masjid untuk biaya hari besar Islam (1 Muharam dan Isra' Mi'raj), bantuan untuk setiap pesantren Rp. 25 Juta/ tahun di seluruh Bandar Lampung serta adanya program pembangunan 3 Masjid/ tahun sebesar Rp. 500 juta/masjid/tahun.

Program di bidang infrastruktur, adanya program perbaikan dan perluasan jalan protokol, lampu jalan, taman kota, air mancur yang ada diseluruh Kota Bandar Lampung. Pembangunan drainase di titik-titik rawan banjir dan pembangunam tiga 3 jembatan layang (*fly over*) di Kota Bandar Lampung.

(Sumber: <http://www.zainudinhasan.com/2013/07/profil-herman-hn.htm>.  
Diakses 24 Februari 2014)

Permasalahan yang umumnya muncul ketika seorang kepala daerah yang belum habis masa jabatannya mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah berkembangnya penilaian negatif dalam masyarakat bahwa calon tersebut adalah figur yang mengejar kekuasaan, sebab secara ideal, sebagai kepala daerah seharusnya menyelesaikan dulu program pembangunan dan pelayanan publik di suatu daerah sampai dengan masa jabatannya habis. Kemungkinan lain yang dapat terjadi adalah mobilisasi birokrasi di daerah pemerintahannya, yaitu menyalahgunakan wewenang sebagai kepala daerah untuk menggerakkan para bawahannya dalam proses kampanye maupun bentuk dukungan politik lain. Pada sisi lain, keuntungan yang dimiliki adalah calon tersebut secara tidak langsung telah melakukan kampanye atau sosialisasi mengenai profil dirinya maupun program-program pembangunan yang telah dilaksanakan selama lebih kurang lima tahun menjabat sebagai kepala daerah.



Penelitian ini akan dilaksanakan di Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, dengan beberapa alasan bahwa Kecamatan Labuhan Ratu merupakan kecamatan baru hasil pemekaran dari Kecamatan Kedaton yang berdiri pada tanggal 17 September 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, sehingga dengan dilakukan penelitian di Kecamatan ini maka akan diperoleh gambaran mengenai orientasi politik masyarakat di salah satu kecamatan baru di Kota Bandar Lampung.

Kelurahan Labuhan Ratu merupakan Ibu Kota Kecamatan Labuhan Ratu, sehingga cukup mewakili seluruh kelurahan yang ada dan pelaksanaan penelitian di Kelurahan ini merupakan representasi dari enam kelurahan yang ada yaitu Kelurahan Kampung Baru Raya, Labuhan Ratu, Labuhan Ratu Raya, Sepang Jaya, Kota Sepang dan Bandar Gumanti. Terdapat data dan sumber data yang mendukung pelaksanaan penelitian Kelurahan Labuhan Ratu, yaitu terdapat 3.983 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Alasan lainnya adalah sampai dengan penelitian ini dilaksanakan belum ada penelitian dengan kajian serupa di Kelurahan Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis melakukan penelitian dalam Skripsi yang berjudul: Orientasi Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung Terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung.

**B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah Orientasi Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung Terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung?”

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Orientasi Politik Masyarakat Kota Bandar Lampung Terhadap Pencalonan Herman HN dalam Pemilihan Gubernur Lampung

**D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

**1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya cakrawala pengetahuan dan wawasan dalam kajian ilmu pemerintahan pada khususnya dan khazanah ilmu-ilmu sosial politik pada umumnya.

**2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi dan bahan rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan kajian mengenai orientasi politik masyarakat dalam kaitannya dengan Pemilihan Kepala Daerah pada masa-masa mendatang.